

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, salah satu indikatornya adalah rendahnya tingkat pendapatan per kapita. Salah satu penyebab utama pendapatan per kapita yang rendah adalah kemiskinan. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah kemiskinan melalui berbagai cara, seperti pembangunan sektor pertanian, peningkatan sumber daya manusia, retribusi pendapatan, pembangunan infrastruktur, dan alternatif lainnya. Dalam Islam, pendistribusian pendapatan dikenal sebagai zakat. Zakat adalah kegiatan menyalurkan sebagian harta atau kekayaan yang telah memenuhi nisab (batas minimum harta yang dizakati) dan haul (batas waktu satu tahun hijriah) kepada mereka yang berhak. Penerima zakat biasanya disebut mustahik.

Zakat diwajibkan kepada segenap umat islam. Zakat tidak bisa dialihkan untuk orang lain, sebab zakat ditanggungkan pada setiap individu dan bertujuan untuk mensucikan hati, jiwa dan harta. Hal tersebut berdasarkan kalam Allah Swt pada QS. At Taubah [9]: 103 yaitu:

كُلُّ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تُظَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu bisa memberikan ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At Taubah [9]:

Saat seorang muslim membayar zakat, ia akan merasakan berbagai hikmah dan manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Zakat dapat menumbuhkan sikap kedermawanan, kepedulian sosial, kasih sayang, serta mengurangi rasa iri antara yang kaya dan miskin. Selain itu, zakat membantu mengurangi pengangguran, menangani kemiskinan, dan mendorong perkembangan ekonomi umat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat juga berfungsi sebagai alternatif untuk pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung efektivitas ini, pemerintah Indonesia telah mendirikan badan khusus yang bertugas mengelola dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara nasional, yang dikenal sebagai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat serta infak/sedekah di tingkat nasional. Sebagai lembaga non-struktural yang bersifat independen, BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan laporan minimal satu kali setahun. Untuk pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia, pemerintah membentuk BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan BAZNAS dilakukan oleh Menteri atas usulan dari gubernur atau wali kota/bupati sesuai dengan tingkatannya, setelah mendapatkan pertimbangan

dari BAZNAS. (Kalfadia, 2023)

BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat, harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakatnya. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dari mana zakat mereka berasal dan bagaimana penggunaannya. Melakukan analisis terhadap sistem dan prosedur dapat membantu BAZNAS dalam memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di era modern saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan perkembangan teknologi yang pesat dan persaingan di berbagai bidang yang memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk mendukung hal ini, pendidikan menjadi sangat penting, namun biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi kendala bagi mereka yang terbatas secara ekonomi. Oleh karena itu, diluncurnya program Pekalongan Pintar sebagai salah satu inisiatif dari BAZNAS Kota Pekalongan untuk mengatasi masalah tersebut.

Program Pekalongan Pintar, yang digagas oleh BAZNAS Kota Pekalongan, merupakan inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran zakat yang terarah. Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program ini, diperlukan analisis mendalam mengenai sistem dan prosedur dalam penerimaan dan penyaluran zakat.

Penerimaan dan penyaluran zakat melibatkan berbagai pihak serta proses yang rumit, mulai dari identifikasi muzakki (pemberi zakat), pengumpulan zakat, hingga distribusi zakat kepada mustahiq (penerima zakat).

Untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan lancar dan akuntabel, dibutuhkan sistem dan prosedur yang jelas dan terstruktur.

Sumber penerimaan zakat terdiri dari berbagai kategori, termasuk individu yang secara sukarela membayar zakatnya langsung ke kantor BAZNAS, perusahaan seperti pabrik teh dan pabrik batik, serta pegawai negeri (ASN) yang merupakan salah satu sumber utama bagi BAZNAS Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga kontribusi dari kotak infaq yang ditempatkan di berbagai masjid di Pekalongan, yang semuanya berkontribusi pada sistem penerimaan zakat.

BAZNAS Kota Pekalongan menyalurkan dana zakat melalui berbagai saluran, termasuk bantuan untuk pegawai non-ASN, paket sembako, dukungan dana untuk anak yatim, modal kerja untuk zakat produktif, dan lainnya. Dalam konteks Program Pekalongan Pintar, penyaluran zakat difokuskan pada guru ngaji dan siswa SD serta SMP dalam bentuk uang tunai untuk mendukung pendidikan di Kota Pekalongan. Hal ini bertujuan agar prosedur penyaluran zakat dapat dipahami dengan baik.

Jika sebuah sistem menghadapi masalah, hal tersebut dapat mengganggu atau menghambat kinerjanya. Contohnya, dalam sistem penerimaan dan penyaluran zakat, adanya kecurangan seperti manipulasi data atau penipuan dapat merugikan mustahiq (penerima zakat) dan pemberi zakat, karena dana zakat tidak tersalur dengan tepat.

Tanpa adanya sistem dan prosedur yang memadai, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan zakat, baik dalam proses penerimaan maupun

penyalurannya. Melakukan analisis terhadap sistem dan prosedur dapat membantu mengidentifikasi celah-celah yang berisiko disalahgunakan serta merancang langkah-langkah pencegahannya.

Sistem dan prosedur yang efektif dan efisien dapat memperbaiki kinerja Program Pekalongan Pintar dalam mencapai tujuannya, yaitu memberdayakan masyarakat miskin, khususnya dalam bidang pendidikan, melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat landasan diatas, maka rincian permasalahan yang diambil penulis adalah :

1. Bagaimana sistem dan prosedur penerimaan dan pentasarufan zakat program pekalongan pintar pada BAZNAS Kota Pekalongan?
2. Kendala dan Upaya apa saja yang terjadi pada sistem dan prosedur penerimaan dan pentasarufan zakat program pekalongan pintar pada BAZNAS Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan dan pentasarufan zakat program pekalongan pintar pada BAZNAS Kota Pekalongan?
2. Untuk mengetahui kendala - kendala apa saja yang terjadi sistem dan prosedur penerimaan dan pentasarufan zakat program pekalongan pintar pada BAZNAS Kota Pekalongan?

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis

Untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang merupakan syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, penulis perlu mengukur pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan akuntansi pada instansi pemerintahan, khususnya dalam hal sistem dan prosedur penerimaan serta penyaluran zakat.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Seperti halnya kontribusi, evaluasi, dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait sistem dan prosedur penerimaan serta penyaluran zakat.

3. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Sebagai referensi bagi penulis lain yang akan meneliti sistem dan prosedur penerimaan serta penyaluran zakat, serta sebagai tambahan literatur di kampus, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas lulusan Program Studi Diploma III Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

1.5 Metode Tugas Akhir

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

1. Lokasi Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan(BAZNAS) Kota Pekalongan yang beralamatkan Podosugih , Kec. Pekalongan Barat., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 11111.

2. Jenis Data

Informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah sebagai persepsi terhadap objek eksplorasi (revenge income framework) secara langsung dan dengan melakukan entry level position pada dinas terkait sehingga dapat langsung melakukan survey pelatihan.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data-data sebagai berikut :

- a) Data primer, yaitu data yang berasal dari narasumber langsung atau perusahaan dalam bentuk wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal internet sebagai referensi maupun kajian pustaka.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun guna memberikan suatu gambaran tentang penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dibahas mengenai teori-teori yang relevan dan dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Gambaran umum penelitian berisi tentang informasi dari objek penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian penulisan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bagian ini hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta berisi saran yang diberikan penulis.